

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang serius dan dialami oleh berbagai negara di dunia. Fenomena kemiskinan selalu menjadi pusat perhatian di negara-negara di dunia. Kemiskinan identik dengan kondisi kekurangan sumber daya. Kemiskinan termasuk persoalan yang sangat kompleks, sehingga kemiskinan menjadi permasalahan yang krusial di seluruh dunia (Suryadi, 2020). Suryadi juga menambahkan bahwa kemiskinan adalah fenomena sosial yang masih diteliti solusi mengatasinya. Sedangkan menurut Purwanto dkk (2018), kemiskinan dinilai dapat menyebabkan dampak yang memiliki sifat menyebar terhadap kehidupan masyarakat secara menyeluruh, sehingga kemiskinan dapat menjadi akar dari permasalahan yang lainnya.

Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami semua negara di dunia. Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia, yang termasuk ke dalam negara yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Kemiskinan menjadi salah satu masalah utama yang perlu mendapat perhatian oleh pemerintah Indonesia. Beberapa kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperkecil angka kemiskinan, tetapi hingga saat ini masih belum banyak perubahan. Hal itu dapat dilihat dari angka kemiskinan di Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang disajikan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Data Angka Kemiskinan di Indonesia Maret 2019- Maret 2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Persentase (%) dari Jumlah Penduduk
1	2019	25,14	9,41
2	2020	26,42	9,78
3	2021	27,54	10,14
4	2022	26,16	9,54
5	2023	25,90	9,36

Sumber: Data Angka Penduduk Miskin Badan Pusat Statistik (BPS) 2023

Berdasarkan data tabel 1 terlihat bahwa angka kemiskinan di Indonesia dari Maret 2019 hingga Maret 2023 masih belum terlihat perubahan yang signifikan. Dalam jangka waktu lima tahun, rata-rata persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 9,64 %. Hanya saja, pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan, yaitu pada angka 10,14 %. Hal tersebut dipicu adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh negara di dunia.

Pemerintah selalu berbenah dan berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut secara tegas dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang no 11 tahun 2010 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang no 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Salah satu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dalam tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan

(PKH) yang dimulai pada tahun 2007. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) UU no 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan bahwa “perlindungan sosial adalah segala upaya yang dilakukan dan diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial“. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 menegaskan bahwa program keluarga harapan adalah program bantuan bersyarat kepada keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, yang diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini ditujukan untuk menanggulangi dan mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam pengertiannya, Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki beberapa komponen utama sebagai tujuannya, yaitu kesehatan dan pendidikan. Tujuan dalam bidang kesehatan yang dimaksud adalah meningkatkan kesehatan ibu serta anak di Indonesia sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu masyarakat miskin. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang kunci untuk melakukan segala aktivitas, karena seseorang yang sehat tentu akan dapat melakukan kegiatan perekonomian untuk memenuhi kebutuhannya ataupun keluarganya. Tujuan PKH selanjutnya adalah bidang pendidikan, diharapkan melalui kebijakan ini dapat menaikkan angka pendidikan dasar yang harus wajib sekolah selama 9 tahun dan juga untuk menurunkan angka pengangguran pada keluarga yang sangat miskin. Selain itu, tujuan dari pendidikan bukan saja untuk menyediakan dan mempersiapkan angka angkatan kerja, juga harus bisa mencapai nilai-nilai sosial dan membebaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kebodohan.

Pelaksanaan PKH di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2007 diawali dari tujuh provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Kupang, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur (Kota Kupang). Program Keluarga Harapan dianggap mampu menanggulangi permasalahan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena hal tersebut, pemerintah kemudian melaksanakan Program Keluarga Harapan secara nasional pada tahun 2012.

Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu wilayah di Sumatera Utara yang menjadi sasaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah dimulai sejak tahun 2014. Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari 10 kecamatan, 1 kelurahan dan 153 desa. Salah satu desa yang melaksanakan program keluarga harapan adalah Desa Baringin. Jumlah penduduk di desa Baringin tercatat sampai dengan tahun 2023 sebanyak 293 KK. Desa Baringin terdiri dari 6 dusun, yaitu Dusun Hutahariara, Dusun Baringin Pasar, Dusun Baringin Toruan, Dusun Panjadian, Dusun Sijungkang dan Dusun Sitapongan.

Pelaksanaan PKH di Desa Baringin sangat mengalami keterlambatan. Hal itu terlihat dari pelaksanaan PKH yang dimulai dari tahun 2012 secara nasional, namun pada kenyataannya pelaksanaan PKH di Desa Baringin dimulai pada tahun 2018. Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan PKH tersebut, membuat masih banyaknya angka keluarga miskin di Desa Baringin. Sehingga melalui program PKH ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat di Desa Baringin. Tabel 2 menyajikan data jumlah keluarga, keluarga miskin dan keluarga penerima manfaat PKH di Desa Baringin.

Tabel 2 Penerima PKH Perdusun di Desa Baringin 2023

No	Nama Dusun	Total Keluarga Perdusun	Total Keluarga Miskin	Total Keluarga Penerima PKH
1	Baringin Pasar	103	34	15
2	Baringin Toruan	27	23	12
3	Huta Hariara	24	13	6
4	Panjadian	39	20	9
5	Sijungkang	57	30	13
6	Sitapongan	44	27	11
Total		293	147	66

Sumber: Data Keluarga Penerima PKH Desa Baringin 2023

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah keluarga di Desa Baringin yang tercatat hingga tahun 2023 adalah sebanyak 293 KK. Dari total jumlah keluarga tersebut, sebanyak 147 KK (50, 17 %) adalah keluarga yang dikategorikan miskin. Namun tidak semua dari keluarga miskin tersebut merupakan keluarga penerima manfaat PKH. Terdapat hanya 66 KK (44, 89 %) saja dari keseluruhan keluarga miskin yang mendapat bantuan program keluarga harapan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, bahwa PKH pada dasarnya ditujukan kepada RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Desa Baringin. Namun setelah dilaksanakan 5 tahun berturut-turut di Desa Baringin sejak tahun 2018-2023, tidak semua keluarga miskin mendapatkan bantuan PKH tersebut. Hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar diketahui faktor yang menyebabkan tidak meratanya penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan yang ada di Desa Baringin.

Oleh karena itu diperlukan adanya analisis secara spasial untuk mengkaji lebih lanjut persebaran penerima PKH di Desa Baringin. Analisis spasial tidak dapat dipisahkan dengan fenomena keruangan yang ada di muka bumi ini. Hal tersebut dikarenakan analisis spasial memungkinkan dapat membantu kita dalam menganalisis pola ruang yang ada dipermukaan bumi ini, termasuk persebaran penerima PKH. Analisis spasial adalah teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi data dari sudut pandang spasial. Dalam menentukan persebaran penerima program keluarga harapan, analisis data spasial dapat digunakan untuk memberikan solusi (Praharsa & Eddy, 2002). Data persebaran penerima PKH sangat jarang ditemukan pada daerah yang menjadi sasaran pelaksanaan program keluarga harapan, termasuk di Desa Baringin. Data persebaran yang dihasilkan dari analisis spasial, dapat membantu keberlangsungan pelaksanaan program keluarga harapan. Dengan adanya analisis secara spasial, dapat memetakan persebaran penerima PKH yang ada di Desa Baringin.

Mendasari penerapan program keluarga harapan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara spasial implementasi bantuan sosial program keluarga harapan, yang bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi serta memetakan persebaran penerima PKH di Desa Baringin. Teori evaluasi kebijakan yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah teori Dunn (2013) dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan ketepatan yang menjadi tolak ukur yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan program keluarga harapan di desa Baringin.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia 2019-2023
2. Keterlambatan pelaksanaan PKH di Kabupaten Humbang Hasundutan yang terlaksana pada tahun 2014 dan di Desa Baringin pada tahun 2018 dibandingkan pelaksanaan PKH secara nasional pada tahun 2012.
3. Masih banyaknya keluarga yang berstatus miskin di Desa Baringin.
4. Belum seluruhnya masyarakat yang dikategorikan miskin menerima dana/bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
5. Tidak meratanya persebaran penerima bantuan PKH disetiap dusun di Desa Baringin
6. Desa Baringin belum memiliki peta persebaran penerima PKH.
7. Perlunya tindakan evaluasi untuk mengukur keberhasilan dari implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Baringin

C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini difokuskan pada pembahasan karakteristik penerima PKH di Desa Baringin, analisis implementasi PKH di Desa Baringin, evaluasi implementasi PKH di Desa Baringin dan menganalisis persebaran penerima PKH di Desa Baringin.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik penerima Program Keluarga Harapan di Desa Baringin?
2. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Baringin?
3. Bagaimana evaluasi implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Baringin?
4. Bagaimana persebaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa Baringin?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik penerima Program Keluarga Harapan di Desa Baringin.
2. Untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Baringin.
3. Untuk mengevaluasi implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Baringin.
4. Untuk mengetahui persebaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa Baringin.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan agar penelitian ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi orang/pihak lain sehingga dapat melakukan penelitian yang berhubungan dengan program keluarga harapan.

2. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dijadikan sebagai referensi bagi pihak lain dalam melakukan Evaluasi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah yang lain
- b) Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan yang baik kepada pelaksana program keluarga harapan (PKH) di Desa Baringin, Kecamatan Parlilitan.
- c) Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan ajar terkait dengan materi kebijakan publik atau persebaran penduduk di sekolah/persekolahan.
- d) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar atau referensi bagi mahasiswa dan dosen di dalam perkuliahan pada materi yang berhubungan dengan persebaran atau kebijakan publik.